



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 07 Januari 2021

Halaman: 1

PEKAN DEPAN PEMERINTAH BERLAKUKAN PENGETATAN JAWA-BALI

Pemda DIY Ikut Aturan Pembatasan, Pegawai Siap-siap WFH

YOGYA (MERAPE)- Pemda DIY tengah menyiapkan pelaksanaan instruksi pembatasan pergerakan orang seperti yang telah disampaikan pada rapat Presiden Joko Widodo dengan para Gubernur di Indonesia, Rabu (6/1) secara daring.

"Jadi ini tadi saya baru saja mendampingi Ngarsa Dalem (Gubernur DIY, Sri Sultan HB X) rapat bersama presiden. Termasuk para menteri dan seluruh gubernur di Indonesia. Menang seperti yang teman-teman sampaikan tadi bahwa untuk wilayah Jawa-Bali terutama itu, perlu ada pembatasan pergerakan orang," ungkap Sekda DIY, Baskara Aji kepada wartawan, Rabu (6/1).

Aji mengatakan pada prinsipnya Pemda DIY siap menjalankan instruksi yang diberikan pemerintah pusat.

Bersambung ke halaman 9

Pemda Sambungan halaman 1

Untuk selanjutnya, instruksi akan dirapatkan dengan mengundang para bupati dan wali kota pada Kamis hari ini (7/1) sehingga dapat dirumuskan kriteria pembatasan seperti apa.

"Pemda DIY siap terkait perintah pembatasan. Namun seperti apa (pembatasan) yang akan kita lakukan tentu nanti kita akan bicara dengan bupati dan walikota di DIY. Besok pagi pak Wagub akan memimpin rapat bersama bupati dan walikota. Semua akan kita undang rapat," jelasnya.

Aji mengungkap kriteria pembatasan dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Instruksi menjadi acuan, selanjutnya diserahkan ke daerah.

"Dari unsur pegawai baik pegawai negeri maupun swasta perlu ada pembatasan (WFH). Tetapi semua dikembalikan ke daerah sesuai kondisi masing-masing daerah. Untuk itu (rapat) dalam rangka merumuskan ini karena diminta memberlakukan pada tanggal 11 sampai dengan 25 Januari," jelasnya.

Aji mengungkap pembatasan pergerakan tersebut belum bisa dipastikan apakah akan dibuat dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) atau Surat Edaran (SE) seperti yang sebelumnya pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini akan dibicarakan pada rapat hari ini (7/1).

"Termasuk regulasi dalam bentuk apa besok kita hadirkan dari biro hukum supaya sesuai. Mengacu kemarin di tahun baru kita menggunakan (surat) instruksi," ujarnya.

Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat pada 11-25 Januari 2021 khususnya di Pulau Jawa dan Bali merespons kasus aktif Covid-19 yang meningkat secara eksponensial.

"Pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan pada 11-25 Januari 2021 dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah Rapat Terbatas Melalui "Video Conference" yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan topik di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Pemerintah, kata dia, akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Selain itu juga meningkatkan operasi yustisi yang akan dilaksanakan Satpol PP, aparat kepolisian, dan unsur TNI. "Sekali lagi ini sesuai amanat dari PP 21 Tahun 2020 (tentang PSBB) di mana mekanisme sudah jelas yaitu sudah ada usulan daerah dan juga Menkes serta edaran dari Mendagri," katanya.

Dengan begitu diharapkan pada 11-25 Januari 2021, mobilitas di Pulau Jawa dan Bali akan dimonitor secara ketat. Ia menambahkan pada saat bersamaan pemerintah diharapkan sudah menyiapkan program vaksinasi sehingga tingkat kepercayaan masyarakat bertambah.

"Dengan pengetatan pembatasan ini bukan pelarangan, seluruh aktivitas tersebut tetap masih dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat," katanya.

(C-4)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. BKPP			

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005